

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENEGAK HUKUM  
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**AGUNG WAHID  
2040050003**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENEGAK HUKUM  
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**AGUNG WAHID**

**2040050003**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**VISI:**

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

*To be a leading Faculty of Law in the Asian by 2030 which owns research and community service in the Field of law that is anticipatory to changes and advances in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian and Pancasila values.*

**MISI:**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

*Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of jurisprudence through scientific, Interdiscipliner and transnational approaches in accordance with the demands of the times In order to be able to compete in the era of globalization.*

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

*Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.*

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

*Developing the legal knowledge with national and international perspectives.*

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

*Developing and improving research and professionalism in the legal science and other fields.*

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

*Organizing sustainable education and professions in the field of law.*

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

*Encouraging research and community service that can increase awareness of rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people.*

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta Instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang Ilmu pengetahuan lainnya.

*Mantaining relationships with legal practitioners, Law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiostical institutions in the development and the implementation of law and other field of sciences.*

#### **NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA:**

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
4. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Wahid

NIM : 2040050003

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Penegak Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 31 Januari 2024



(Agung Wahid)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama : Agung Wahid  
NIM : 2040050003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Penegak Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2024

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.)

(Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H.)

NIDN : 0321125804

NIDN : 8991000020

Ketua Program Studi

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0327046303



(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.)

NIDN : 0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 31 Januari 2024 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

**Nama** : Agung Wahid

**NIM** : 2040050003

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Peminatan** : Hukum Pidana

**Judul** : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Penegak Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana

**Nama Penguji**

**Jabatan dalam Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.

Sebagai Ketua

2. Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H.

Sebagai Anggota

3. Mawar Sitohang, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

Jakarta, 31 Januari 2024

## HALAMAN PENGESAHAN

### Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Penegak Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana

#### SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia  
Disusun Oleh:

**Nama** : Agung Wahid

**NIM** : 2040050003

**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji Skripsi Pada Tanggal 31 Januari 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Pengaji

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.)

NIDN : 0321125804

(Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H.)

NIDN : 8991000020

**Anggota Tim Pengaji**

  
(Mawar Sitohang, S.H., M.H.)

NIDN : 0307038104



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Wahid  
NIM : 2040050003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Penegak Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Nonekslusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 31 Januari 2024  
Yang Menyatakan

  
  
Agung Wahid

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk segala berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Penegak Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana” tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat administrasi menyelesaikan pendidikan tinggi dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan lupa terhadap orang-orang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang kepada:

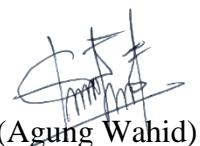
1. Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Orang tua tunggal penulis, yaitu Tan Erlin yang berperan sebagai ayah sekaligus ibu dalam kehidupan penulis hingga saat ini. Terima kasih atas kasih sayang, doa, kepercayaan serta perjuangan yang tak terhingga, sehingga penulis sampai berada pada titik ini.
3. Kepada kakak yang terkasih, Draliyanti Santoso, Maria Dewi Candra, Trisyte Andriani, dan Martha Karlina yang senantiasa dengan setia memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang penulis banggakan, keluarga besar Erlin Fam atas doa, semangat dan penghiburan yang diberikan sejak awal penulis memulai mengerjakan skripsi ini hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H, M.BA., selalu Rektor Universitas Kristen Indonesia dan staff serta jajarannya.
6. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

8. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H., dan Bapak Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya karena sudah membimbing penulis dalam melakukan penulisan sehingga pembuatan karya tulis ini dapat selesai.
10. Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
11. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan waktu yang sudah diberikan untuk mendidik penulis, kiranya ilmu yang penulis terima dapat penulis pergunakan dengan baik.
12. Yang Penulis kasih, yaitu Om Ginardi Romanus dan Tante Marcellina Yuniarti serta Mas Leonardus Yudha Pradana. Terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
13. Terima kasih kepada Gisela Anindhita Anggraeni yang telah memberikan kritik, saran ataupun masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata baik dan sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta kritik yang bisa membangun penulis untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang penulis kerjakan dapat bermanfaat bagi banyak orang Tuhan Yesus memberkati.

Jakarta, 31 Januari 2024

Penulis



(Agung Wahid)

## DAFTAR ISI

VISI DAN MISI .....	ii
FORM PERNYATAAN ORISIONALITAS/KEASLIAN .....	iv
FORM PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....	v
FORM PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS SKRIPSI .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
FORM PERNYATAAN PUBLIKASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A.	Latar Belakang Permasalahan .....	1
B.	Perumusan Masalah .....	5
C.	Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D.	Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
E.	Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	6
1.	Kerangka Teori .....	6
2.	Kerangka Konsep .....	8
F.	Metode Penelitian .....	11
1.	Jenis Penelitian .....	11
2.	Pendekatan Penelitian .....	11
3.	Jenis Data .....	12
4.	Teknik Pengumpulan Data .....	14
5.	Analisis Data .....	14

G.	Rencana Sistematika Penelitian .....	14
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A.	Teori Perlindungan Hukum .....	16
B.	Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	18
C.	Pengertian Analisis Yuridis.....	20
D.	Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Penegak Hukum ...	20
E.	Pengertian Korban Salah Tangkap .....	27
F.	Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana .....	32
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A.	Ganti Kerugian .....	37
a.	Macam-macam Ganti Kerugian .....	39
b.	Mekanisme Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian .....	41
c.	Jangka Waktu / Kadaluarsa Permintaan Ganti Kerugian ..	42
d.	Pengaturan Tentang Jumlah Pembayaran Ganti Kerugian .....	43
B.	Rehabilitasi .....	46
a.	Jenis-Jenis Rehabilitasi .....	47
b.	Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A.	Ketentuan Hukum Tentang Prosedur dan Batasan Yang Harus Dipatuhi .....	51
1.	Penyidik Polri .....	51
2.	Jaksa Penuntut Umum .....	53
3.	Hakim .....	55
B.	Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penegak Hukum .....	57
1.	Penyidik Polri .....	57

a.	Sanksi Administratif .....	57
b.	Sanksi Perdata .....	58
c.	Sanksi Perdata.....	59
2.	Jaksa Penuntut Umum .....	62
3.	Hakim .....	63
a.	Upaya Hukum Biasa .....	67
b.	Upaya Hukum Luar Biasa .....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A.	Kesimpulan .....	72
B.	Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>74</b>

## ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Agung Wahid  
B. Nomor Induk Mahasiswa : 2040050003  
C. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Penegak Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana  
D. Program Kekhususan : Hukum Pidana  
E. Jumlah Halaman : i- xvii + 78 halaman + Daftar Pustaka  
F. Daftar Bacaan : Buku, Peraturan Perundangan, Undangan, Jurnal, dan Internet  
G. Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Penegak Hukum; Korban; Salah Tangkap  
H. Ringkasan Isi :

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya contoh kasus orang yang salah tangkap, yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan proses penyidikan yang tidak mengikuti prosedur atau kriteria hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, orang-orang yang mengetahui adanya penangkapan yang melanggar hukum akan menderita secara materi, psikologis, dan fisik, serta mendapat rasa malu dari masyarakat umum. Di Cipulir, Jakarta Selatan, salah satu contoh kasus salah tangkap terjadi pada tahun 2013. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.an/2013/PN.Jkt.Sel yang dilakukan oleh para Terdakwa yang merupakan anak dibawah umur pada saat itu, yaitu Fikri Pribadi, Bagus Firdaus alias Pau, Fatahillah dan Arga Putra Samosir, dan dua (2) terdakwa lain yang sudah dewasa yaitu Nurdin Prianto dan Andro Supriyanto (dengan perkara terpisah). Meninjau Putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 131/PK/Pid.Sus/2015, menyatakan bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 188PK/Pid.Sus/2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 360/PID/2013/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel dinyatakan **BATAL** karena terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata Hakim dalam menerapkan Hukum Pembuktian Acara Pidana. Adapun sebelumnya, Putusan Pengadilan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel *juncto* Nomor 360/PID/2013/PT.DKI Nomor 188 K/Pid.Sus/2014 menyatakan bahwa keempat korban salah tangkap tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama menghilangkan nyawa KORBAN.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan bagaimana penegakan hukum terkait kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanganan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian, tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah mempunyai hak atas kompensasi dan rehabilitasi yang diperjelas dengan Pasal 1 angka 22 dan angka 23 KUHAP serta Pasal 95 dan Pasal 97. Hak yang dimaksud berupa ganti rugi berupa uang baik kerugian materiil maupun non materiil. Tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah mempunyai hak untuk menuntut agar status kemanusiaan, kehormatan, dan martabatnya dikembalikan seperti pada saat sebelum ditahan karena perbuatan yang tidak pernah dilakukan, selain menerima kompensasi uang. Dan mengenai kesalahan prosedur dalam penanganan perkara pidana akan berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia, kesalahan prosedur yang berujung pada pelanggaran HAM dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan lembaga penegak hukum. Penegak hukum yang melakukan penegakan hukum secara sewenang-wenang akan mendapatkan konsekuensi yang besar seperti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari profesiya bahkan sampai kepada ancaman pidana.

- I. Dosen Pembimbing I: Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H.

Jakarta, 31 Januari 2024

Penulis



(Agung Wahid)

## ABSTRACT

- A. *Student Name* : Agung Wahid  
B. *Student Identification Number* : 2040050003  
C. *Title of Thesis* : *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Penegak Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*  
D. *Specitifity Program* : Criminal Law  
E. *Number of Pages* : i-xvii + 78 pages + References  
F. *Reading List* : Books, Legislation, Journals, and Internet  
G. *Key Words* : Accountability; Law enforcer; Victim; Wrong Arrest  
H. *Content Summary* :

*This research was conducted because there are many examples of cases of people being wrongly arrested, which were caused by negligence or errors in the investigation process that did not follow established legal procedures or criteria. Therefore, people who are aware of an unlawful arrest will suffer materially, psychologically and physically, as well as experience shame from the general public. In Cipulir, South Jakarta, one example of a case of wrongful arrest occurred in 2013. This case was a criminal case of murder based on the South Jakarta District Court Decision Number 1131/Pid.an/2013/PN.Jkt.Sel carried out by the The defendants who were minors at that time, namely Fikri Pribadi, Bagus Firdaus alias Pau, Fatahillah and Arga Putra Samosir, and two (2) other defendants who were adults, namely Nurdin Prianto and Andro Supriyanto (in separate cases). Reviewing the Supreme Court Decision through Decision Number 131/PK/Pid.Sus/2015, stating that regarding Supreme Court Decision Number 188PK/Pid.Sus/2014 in conjunction with the Jakarta High Court Decision Number 360/PID/2013/PT.DKI which strengthened the South Jakarta District Court Decision Number 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel was declared VOID because there was an error or real mistake by the Judge in applying the Criminal Procedure Evidence Law. Previously, Court Decision Number 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel juncto Number 360/PID/2013/PT.DKI juncto Number 188 K/Pid.Sus/2014 stated that the four victims of wrongful arrest were proven legally and convincingly together to take the life of the VICTIM.*

*The problem formulation in this research is: what is the form of legal protection for victims of wrongful arrest and how is law enforcement related to procedural errors made by law enforcers in handling criminal cases. The method used in this research is a normative research type method which is carried out by examining library materials. The types of approaches used in this research are the statutory approach (Statute Approach) and the case approach (Case Approach). The type of data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*From the research results, suspects or defendants who are unlawfully detained have the right to compensation and rehabilitation which is clarified in Article 1 number 22 and number 23 of the Criminal Procedure Code and Article 95 and Article 97. The right in question is in the form of compensation in the form of money for both material and non-material losses. Suspects or applicants who are unlawfully detained have the right to demand that their human status, honor and dignity be returned to the way they were before they were detained for actions they never committed, apart from receiving monetary benefits. And regarding procedural errors in handling criminal cases that will result in human rights violations, procedural errors that result in human rights violations can weaken public confidence in the justice system and law enforcement institutions. Law enforcers who enforce the law arbitrarily will experience major consequences such as Dishonorable Discharge from their profession and even criminal threats.*

- I. Dosen Pembimbing I : Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H.

Jakarta, 31Januari 2024

Author



(Agung Wahid)